

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

INKESRA

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2022

Volume 8,2023



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

INKESRA

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2022

Volume 8,2023

<https://talaudkab.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 2022

ISSN :

Nomor Publikasi : 71040.2326

Katalog BPS : 4102004.7104

Ukuran Buku : 17,6 X 25,0 cm

Jumlah Halaman : 61+xi halaman

Naskah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

Penyunting

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

Gambar Kulit

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

Diterbitkan oleh

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud

Dicetak oleh

CV. Bahu Bahtera Indah

Sumber Ilustrasi

canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.

TIM PENYUSUN

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022

Pengarah:

Bhayu Prabowo, SST., M.Ec.Dev

Penanggung Jawab:

Bhayu Prabowo, SST., M.Ec.Dev

Penyunting:

Bhayu Prabowo, SST., M.Ec.Dev

Penulis:

Epsilon Diana Putri, S.Tr.Stat

Pengolah Data:

Epsilon Diana Putri, S.Tr.Stat

Gambar Kulit :

Epsilon Diana Putri, S.Tr.Stat

Infografis:

Akhmad Farkhan Hazim, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR



Program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022**.

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Kepulauan Talaud yang menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kepulauan Talaud antar waktu. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret Tahun 2022.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Melonguane , September 2023
Kepala BPS
Kabupaten Kepulauan Talaud

Bhayu Prabowo, SST., M.Ec.Dev

<https://talaudkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
1. KEPENDUDUKAN.....	1
1.1 Jumlah,Laju Pertumbuhan Penduduk,dan Rasio Jenis Kelamin	3
1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk.....	5
1.3 Angka Beban Ketergantungan.....	6
2. KESEHATAN.....	9
2.1 Angka Kesakitan	11
2.2 Tingkat Imunitas Balita.....	12
3. PENDIDIKAN	15
3.1 Angka Melek Huruf (AMH)	17
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	20
3.3 Tingkat Pendidikan.....	21
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM).....	22
4. KETENAGAKERJAAN	25
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	27
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	28
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	30
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	33
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	35
5.2 Konsumsi Kalori dan Protein	38
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	41
6.1 Kualitas Rumah Tinggal.....	43
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal.....	45
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	46
7. KEMISKINAN	49
7.1 Perkembangan Kemiskinan.....	51
7.2 Garis Kemiskinan	53

8. SOSIAL LAINNYA.....	55
8.1 Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	57
8.2 Program Perlindungan Sosial	59
8.3 Kredit Usaha	60
8.4 Tindak Kejahatan	61

<https://talaudkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018-2022	4
1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Kecamatan, 2022..	5

PENDIDIKAN

3.1 Persentase Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2022	18
3.2 Penduduk 15 tahun ke atas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2022.....	21
3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2022.....	22
3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2022	23

KETENAGAKERJAAN

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2018 - 2022.....	28
4.2 Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 – 2022	30

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, 2022	36
--	----

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1 Rumah Tangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2022	44
6.2 Rumah Tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2022	46

SOSIAL LAINNYA

8.1 Persentase Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Telepon Seluler (Hp) Menurut Jenis Kelamin, 2022	58
8.2 Persentase Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin, 2022.....	58
8.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2022	59
8.4 Persentase Rumah Tangga menurut Ada atau Tidak ART yang Menerima Kredit, 2022	60

<https://talaudkab.bps.go.id>

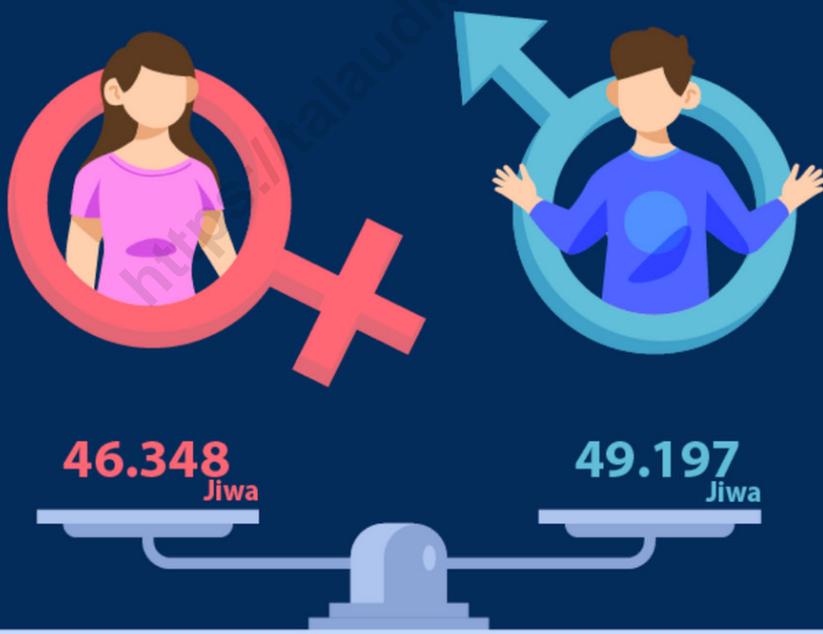
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud (persen), 2018-2022.....	7
1.2 Angka Beban Ketergantungan, 2018-2022	8
2.1 Angka Kesakitan (Morbiditas) Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Jenis Kelamin, 2022	12
2.2 Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kabupten Kepulauan Talaud (Persen), 2022	13
3.1 Harapan Lama Sekolah, 2018-2022	19
3.2 Rata-rata Lama Sekolah, 2018-2022	20
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan (persen), 2022	29
4.2 Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2022	31
5.1 Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2022	37
5.2 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud, 2018-2022	38
6.1 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati, 2022	47
7.1 Persentase Penduduk Miskin, 2018-2022.....	52

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



95.545 Jiwa



RASIO PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

106,20

Artinya terdapat **106 laki-laki** diantara **100 wanita**

KEPENDUDUKAN | 1

Indikator kependudukan yang terdiri dari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan indikator penting yang menjadi pusat dari setiap kebijakan pemerintah. Hampir semua rencana pembangunan perlu ditunjang dengan data jumlah, persebaran, dan susunan penduduk menurut kelompok umur yang relevan dengan rencana tersebut. Sebagai contoh, dalam kebijakan bidang pendidikan diperlukan data mengenai jumlah penduduk usia sekolah.

Dalam upaya untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Kualitas penduduk dapat ditingkatkan dengan peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang layak dan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di samping itu, program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah semua orang yang telah berdomisili selama 1 tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Sehingga, jumlah penduduk merupakan jumlah semua orang yang memenuhi syarat sebagai penduduk dari konsep dan definisi BPS. Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, artinya semakin pesat juga peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan data Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2035, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 sebanyak 95.545 jiwa. Kabupaten Kepulauan Talaud sekitar 3,59 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Utara adalah Kota Manado dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 454.606 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami kenaikan sebanyak 562 jiwa atau 0,59 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018-2022, jumlah penduduk terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Secara tren laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dibawah 2 persen, kecuali pada tahun 2020 sebesar 2,21 persen. Namun pertumbuhan ini masih tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain atau rata-rata nasional. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana, dimana program ini ditujukan untuk menekan angka kelahiran dan menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, permasalahan kependudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud tetap perlu mendapatkan perhatian yang serius, khususnya dalam hal kualitas dan karakteristik penduduk. Analisis lebih lanjut mengenai karakteristik dari penduduk yang akan dibahas di bagian selanjutnya.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
(1)	(2)	(3)
2018	91 599	1,02
2019	92 475	0,96
2020	94 521	2,21
2021	94 983	0,49
2022	95 545	0,59

Sumber : Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka 2023

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud *sex ratio* dicatat sebesar 106. Artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Dapat juga dikatakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang dihadapi terkait kependudukan adalah mengenai distribusi penduduk. Distribusi penduduk dapat dilihat dari persentase penduduk per wilayah dan angka kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap 1 kilometer persegi. Angka kepadatan penduduk bermanfaat untuk mengetahui konsentrasi penduduk suatu wilayah yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam program-program pemerataan penduduk, sebagai contoh program transmigrasi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Kecamatan, 2022

Kecamatan	Penduduk		Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Jumlah	%	Km ²	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabaruan	5 853	6,13	66,03	5,28	89
Damau	4 551	4,76	49,58	3,96	92
Lirung	6 283	6,58	31,11	2,49	202
Salibabu	6 401	6,70	21,80	1,74	294
Kalongan	3 490	3,65	24,81	1,98	141
Morongge	3 903	4,08	20,35	1,63	192
Melonguane	12 058	12,62	77,39	6,19	156
Melonguane Timur	3 870	4,05	48,35	3,86	80
Beo	5 997	6,28	70,93	5,67	85
Beo Utara	4 453	4,66	144,85	11,58	31
Beo Selatan	4 011	4,20	63,87	5,11	63
Rainis	7 346	7,69	80,68	6,45	91
Tampan'Amma	6 564	6,87	124,18	9,93	53
Pulutan	2 398	2,51	58,81	4,70	41
Essang	3 914	4,10	94,76	7,57	41
Essang Selatan	3 725	3,90	75,02	6,00	50
Gemeh	6 539	6,84	137,71	11,01	48
Nanusa	3 373	3,53	58,40	4,67	58
Miangas	816	0,85	2,39	0,19	341
Kepulauan Talaud	95 545	100,00	1 251,02	100,00	76

Sumber : Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka 2023

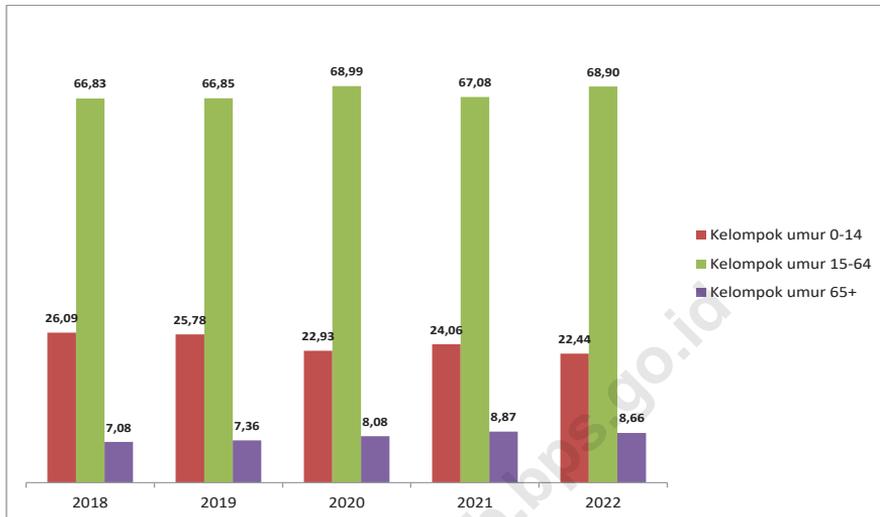
Dilihat dari persebarannya, kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan penduduk paling banyak pada tahun 2022 adalah Kecamatan Melonguane, yaitu sebanyak 12.058 jiwa atau 12,62 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud. Namun dari sisi kepadatan, kecamatan dengan kepadatan penduduk paling padat adalah Kecamatan Miangas sebesar 341 jiwa per kilometer persegi. Artinya, secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Miangas didiami oleh 341 penduduk. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah miangas yang kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 2,39 kilometer persegi.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif.

Gambar 1.1 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud menurut tiga kelompok umur yakni kelompok usia produktif (15-64 tahun), kelompok usia muda (0-14 tahun) dan kelompok usia tua (65 tahun ke atas). Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki penduduk usia muda sekitar 22,44 persen, penduduk usia produktif 68,90 persen, dan penduduk usia lanjut 8,66 persen. Selama periode 2018-2022 telah terjadi peningkatan komposisi penduduk usia lanjut dari 6,82 persen di tahun 2018 menjadi 8,66 persen di tahun 2022, dan dikenal dengan istilah proses penuaan (*aging process*) atau proses transisi umur dari penduduk muda ke penduduk tua. Selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018-2022 terjadi penurunan proporsi penduduk usia muda serta penambahan proporsi penduduk usia produktif dan usia tua.

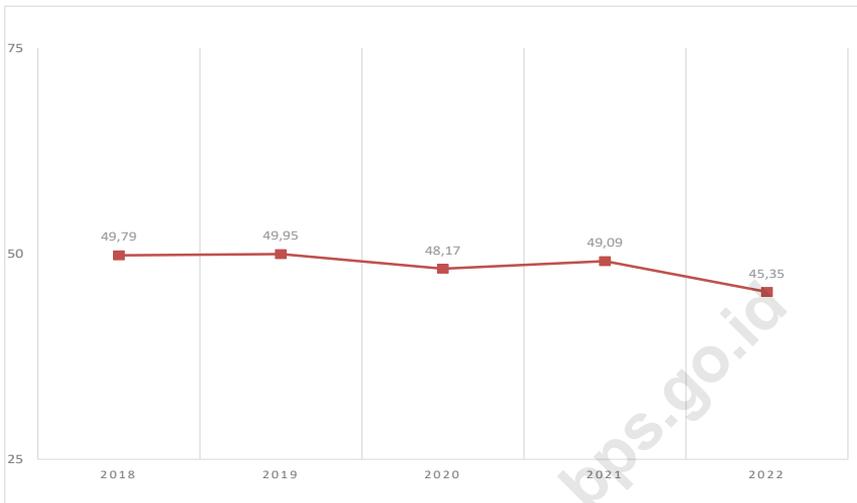
Gambar 1.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud (persen), 2018-2022



Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2035

Pada tahun 2022 angka beban ketergantungan sebesar 45,35 , berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 sampai 46 penduduk usia tidak produktif (usia muda dan tua). Sedangkan pada tahun 2021 angka beban ketergantungan sebesar 49,09. Pada tahun 2022 terdapat penurunan angka beban ketergantungan sebesar 3,74 persen dari angka ketergantungan dari tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan penduduk usia produktif serta penurunan penduduk usia muda dan tua. Semakin rendah rasio ketergantungan maka artinya semakin rendah beban yang ditanggung usia produktif untuk menopang biaya penduduk yang memiliki usia tidak produktif.

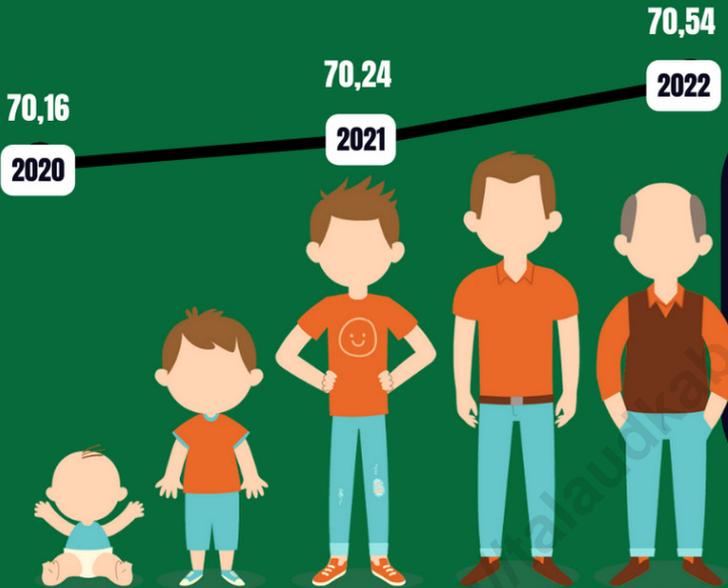
Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan, 2018-2022



Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2035

Tren angka beban ketergantungan 2018-2022 Kabupaten Kepulauan Talaud menurun dari 49,79 di tahun 2018 menjadi 45,35 di tahun 2022. Angka beban ketergantungan berada di bawah angka 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Pada periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

Angka Harapan Hidup



Angka harapan hidup sebesar 70,54 pada tahun 2022 artinya bayi yang baru lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup rata-rata mencapai **70,54 tahun**

Angka Kesakitan 2022

10,7%



Salah satu aspek penting untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Dengan terwujudnya masyarakat yang sehat dan tidak kekurangan gizi, diharapkan akan terwujud pula masyarakat sejahtera. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pada agenda Nawa Cita (Periode Pemerintahan 2015-2019) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, terdapat program Indonesia Sehat. Sasaran program Indonesia Sehat adalah meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).

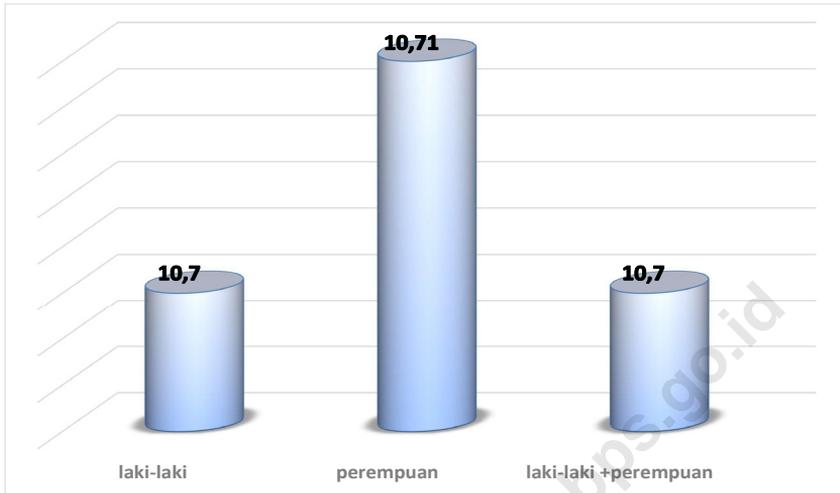
Pemerintah telah melaksanakan program yang disebutkan di atas demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator kesehatan akan dianalisis pada bab ini sebagai evaluasi dari pelaksanaan program tersebut di tahun 2022. Indikator yang akan dibahas pada bab ini antara lain: angka kesakitan dan tingkat imunitas balita. Indikator yang akan dianalisis berasal dari data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS.

2.1 Angka Kesakitan

Salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk adalah morbiditas atau angka kesakitan penduduk. Semakin kecil angka morbiditas berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Merujuk pada konsep Badan Pusat Statistik, morbiditas menunjukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya.

Pada tahun 2022, angka kesakitan (morbiditas) di Kabupaten Kepulauan Talaud mencapai 10,70 persen. Hal ini berarti sekitar 10 hingga 11 dari 100 penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Bila dilihat dari jenis kelamin, angka kesakitan atau morbiditas perempuan lebih besar dari laki-laki namun tidak signifikan.

Gambar 2.1 Angka Kesakitan (Morbiditas) Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Jenis Kelamin, 2022

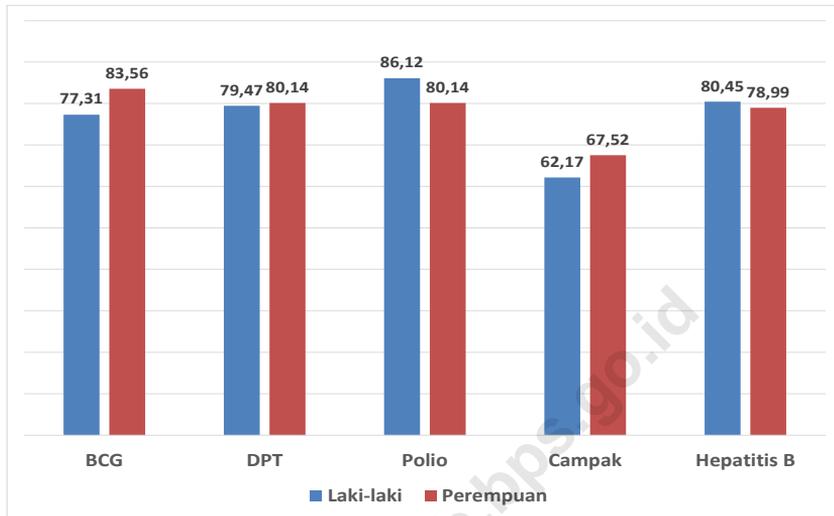


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022

2.2 Tingkat Imunitas Balita

Menurut BPS, Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan dalam mulut), dengan maksud untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Untuk itu imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Gambar 2.2 menunjukkan persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi menurut jenis imunisasi dan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022.

Gambar 2.2 Balita yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Talaud (Persen), 2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022

Pada tahun 2022, balita yang pernah mendapatkan imunisasi di Kabupaten Kepulauan Talaud tergolong relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persentase di hampir setiap jenis imunisasi yang berkisar diatas 70 persen. Pada imunisasi campak untuk balita laki-laki dan perempuan masih lebih rendah dari 80 persen yaitu 62,17 persen untuk balita laki-laki dan 67,52 persen untuk balita perempuan. Namun secara keseluruhan keadaan tingkat imunisasi yang relatif tinggi ini menandakan keberhasilan program sadar imunisasi dan keberhasilan kegiatan kader posyandu di setiap desa di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD)



8643

Jumlah Murid SD

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP)

4295

Jumlah Murid SMP



Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas (SMA)



2917

Jumlah Murid SMA



Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari segi pembelajaran. Selain pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, serta sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan dalam bab ini adalah Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022 yang dilakukan oleh BPS.

3.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan baca-tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca huruf latin, huruf arab, dan atau huruf lainnya. Penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022 sudah mencapai 99,80 persen, kemudian 5,03 persen dapat membaca dan menulis huruf Arab serta 3,69 persen dapat membaca dan menulis huruf lainnya. Sisanya sebanyak 0,20 persen adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca atau buta huruf.

Kemampuan membaca dan menulis penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud sudah sangat tinggi. Tidak hanya di Kabupaten Kepulauan Talaud, banyak kabupaten lain di Indonesia yang juga sudah mencapai Angka Melek Huruf (AMH) yang cukup tinggi. Dengan sudah tingginya AMH di sebagian

besar wilayah Indonesia, maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu, AMH tidak lagi menjadi komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lagi. AMH diganti dengan indikator *Expected Years of Schooling* (EYS) atau Harapan Lama Sekolah (HLS). Kita dapat melihat persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis dari Tabel 3.1.

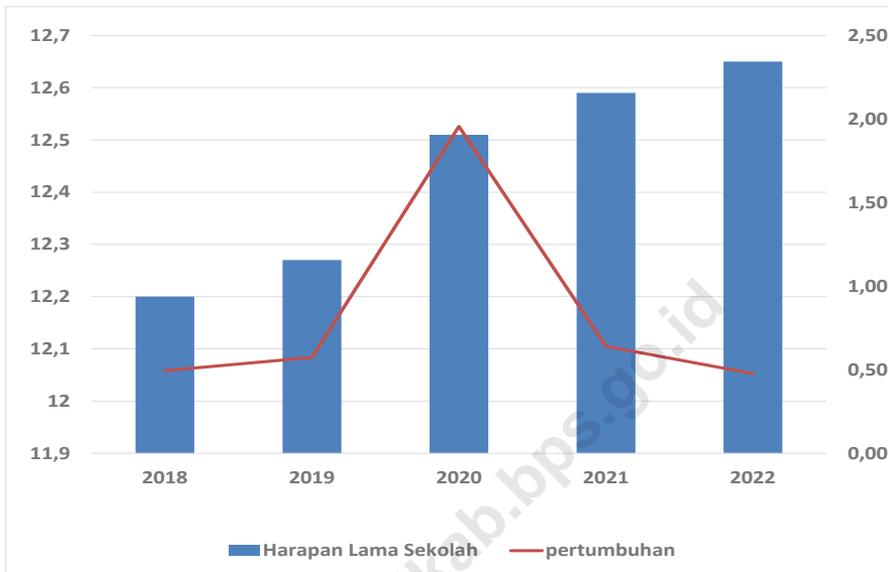
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2022

Kemampuan Membaca dan Menulis		Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	Huruf Latin	99,85
	Huruf Arab	3,96
	Huruf Lainnya	3,52
Perempuan	Huruf Latin	99,76
	Huruf Arab	6,16
	Huruf Lainnya	3,86
Kepulauan Talaud	Huruf Latin	99,80
	Huruf Arab	5,03
	Huruf Lainnya	3,69

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara 2022

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah, 2018-2022



Sumber : Tabel Dinamis BPS Kabupaten Kepulauan Talaud

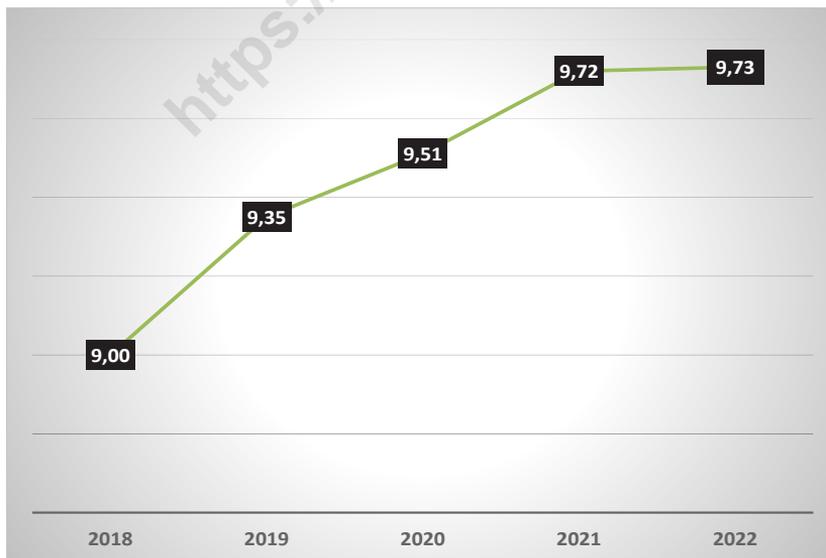
Dari tahun 2018 hingga 2022 angka HLS terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,83 persen. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Rata-rata tiap orang di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022 diharapkan akan melalui pendidikannya selama 12 hingga 13 tahun. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat adalah, indikator pendidikan mengukur manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Segala fasilitas, infrastruktur, dan kebijakan pendukung yang telah disediakan tidak akan ada artinya apabila tidak ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya.

3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 adalah 9,73 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,01 tahun. Angka RLS 9,73 tahun ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud baru mampu menempuh pendidikan hingga lulus SMP.

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah, 2018-2022



Sumber : Tabel Dinamis BPS Kabupaten Kepulauan Talaud

3.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tabel 3.2 Penduduk 15 tahun ke atas per Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan (persen), 2022

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum memiliki Ijazah	9,65	11,11	10,36
Sekolah Dasar	19,92	23,80	21,81
SLTP/Sederajat	24,73	20,53	22,68
SMA/SMK/Sederajat	35,23	28,15	31,79
Diploma I/II/III	1,50	3,76	2,60
Diploma IV/ S1/S2/S3	8,97	12,65	10,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara 2022

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Talaud. Gambaran mengenai peningkatan SDM dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah. Lebih dari setengah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Talaud telah menamatkan pendidikan minimal SLTP (67,83 persen) sedangkan sisanya adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak punya ijazah (10,36 persen) dan tamat SD (21,81 persen).

Dalam hal pendidikan terlihat bahwa telah terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada statistik pendidikan yang ditamatkan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persentase perempuan yang menamatkan pendidikan tertentu dengan persentase laki-laki pada tingkat pendidikan yang sama. Tipisnya perbedaan menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Budaya masa lalu dimana perempuan tidak perlu sekolah karena dipersiapkan untuk mengurus rumah tangga saja sejak lama tidak tergambar di masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. Jika ada perbedaan dalam hal persentase, kemungkinan lebih dipengaruhi oleh kemauan pribadi.

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Kepulauan Talaud belum sepenuhnya berhasil. Ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 13-15 tahun yang sebesar 94,03 persen pada tahun 2022. Dengan kata lain masih ada 5,97 persen anak usia SMP yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah. APS menunjukkan persentase anak usia sekolah yang sedang berada di jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar nilai APS semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Pada anak usia 7-12 tahun, APS menunjukkan angka yang baik, yaitu 98,83 persen. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS jelas akan lebih kecil dibandingkan usia SMP, yaitu sekitar 74,86 persen, karena banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah, 2022

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	97,61	100	98,83
13-15	97,92	89,83	94,03
16-18	71,64	79,66	74,86

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022

Isu gender pada indikator APS Kabupaten Kepulauan Talaud cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Namun di Kabupaten Kepulauan Talaud terlihat berbeda, APS perempuan pada setiap kelompok usia tidak berbeda jauh bahkan lebih tinggi dari laki-laki pada semua kelompok usia. Hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah sukses menerapkan kesetaraan gender dengan tidak adanya diskriminasi kaum perempuan di bidang pendidikan.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2022

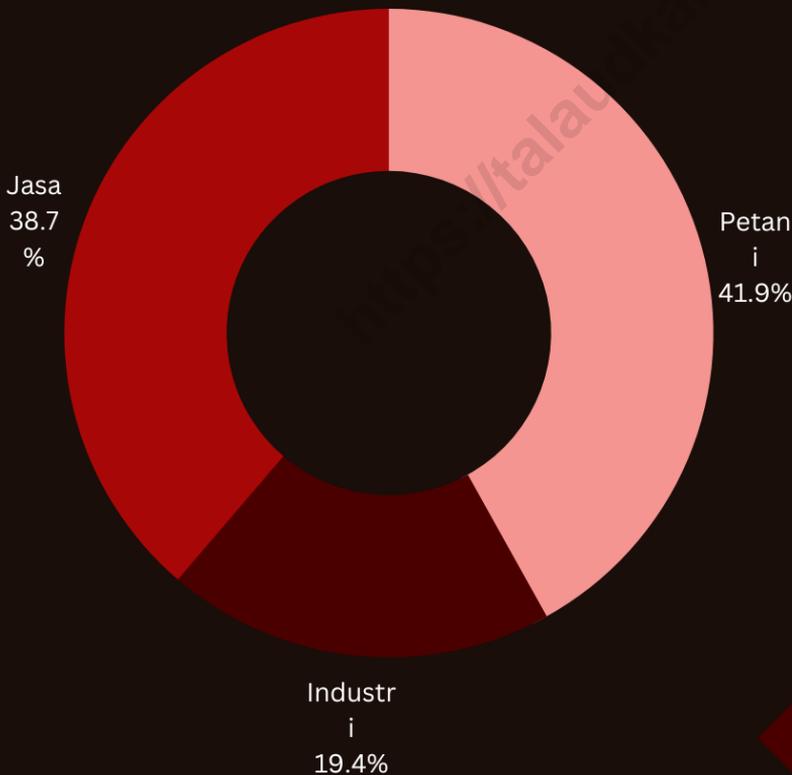
Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	95,09	97,98	96,57
SMP/SLTP	82,25	82,59	81,93
SMA/SLTA	66,97	77,24	71,09

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2022 APM SD/Sederajat di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 96,57 persen, artinya 96,57 persen dari anak usia 7-12 tahun (usia SD) yang masih sekolah, bersekolah pada jenjang SD/ sederajat. Sedangkan APM untuk jenjang SMP/SLTP di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 81,93 persen, artinya 81,93 persen dari anak usia 13-15 tahun yang masih sekolah, bersekolah pada jenjang SMP/SLTP. Begitu pula APM untuk jenjang SMA/SLTA di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 71,09 persen, artinya 71,09 persen dari anak usia 16-18 tahun yang masih sekolah, bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.



Mayoritas penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Talaud bekerja di bidang pertanian



Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, serta persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jam kerja.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu TPT. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen), 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPAK	67,88	71,20	80,97	79,19	74,20
TPT	2,23	2,68	2,64	2,30	3,67

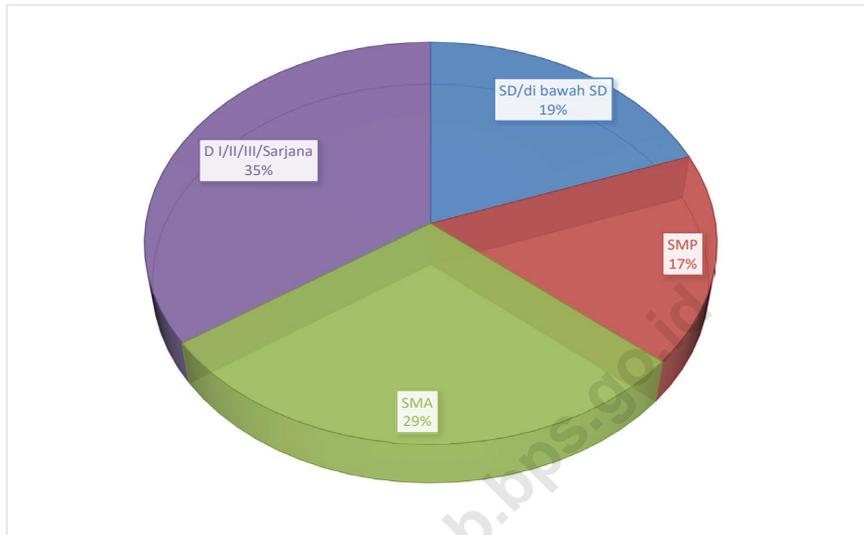
Sumber : Tabel Statis BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 mengalami peningkatan 1,37 persen dibandingkan tahun 2021, yaitu 2,30 persen pada tahun 2021 menjadi 3,67 persen pada tahun 2022. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan, dari 79,19 persen di tahun 2021 menjadi 74,20 persen pada tahun 2022. Ini mengindikasikan terjadinya penurunan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam golongan angkatan kerja.

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Gambar 4.1 Persentase Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan (persen), 2022



Sumber : Tabel Statis BPS Provinsi Sulawesi Utara

Pada tahun 2022, penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud yang menganggur didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir SMA ke atas yaitu 63,75 persen. Sebanyak 29,13 persen penganggur memiliki ijazah SMA, sedangkan penganggur yang sudah menamatkan pendidikan diploma/sarjana mencapai 34,61 persen. Penganggur yang sudah tamat pendidikan diploma inilah yang kemudian disebut dengan pengangguran terdidik. Fenomena mengindikasikan bahwa keadaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Talaud didominasi oleh sektor pekerjaan yang tidak membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu, seperti pekerjaan di sektor pertanian dan sektor primer lainnya. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar angkatan kerja dengan pendidikan rendah dapat terserap. Sementara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang membutuhkan tenaga ahli membuat angkatan kerja dengan tingkat pendidikan tinggi tidak terserap dan akhirnya menganggur.

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada bahasan ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan/konstruksi), dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2018-2022

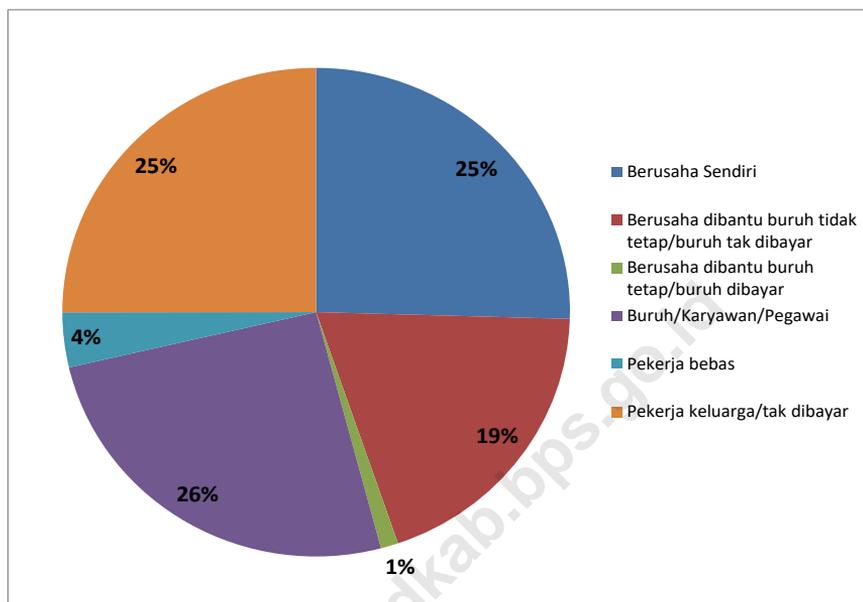
Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	42,34	38,69	57,66	46,24	41,91
Industri	23,16	22,91	9,22	14,64	19,35
Jasa	34,50	38,40	33,11	39,12	38,74
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

Sumber : Profil Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2022

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Talaud masih didominasi pada sektor pertanian. Sektor kedua yang mendominasi setelah pertanian adalah sektor Jasa. Pada Tabel 4.2, dapat terlihat bahwa terjadi penurunan penduduk yang bekerja di bidang pertanian dan sebaliknya terjadi peningkatan penduduk bekerja di bidang industri. Hal ini mengindikasikan masih berlangsungnya proses industrialisasi.

Dari sisi status pekerjaan, pada tahun 2022, lebih dari sepertiga (45,88 persen) penduduk bekerja memiliki status pekerjaan berusaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Status pekerjaan terbanyak kedua adalah buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 25,48 persen. Selain itu, ada juga penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas (3,64 persen) yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas non pertanian.

Gambar 4.2 Komposisi Status Pekerjaan Penduduk yang Bekerja (persen), 2022



Sumber : Profil Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara 2022

Gini Ratio

0,356



PERSENTASE PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN

Non Makanan

43,76%



Makanan

56,26%



POLA DAN TARAF KONSUMSI | 5

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk tahun 2022 sebesar 1.098.942 rupiah. Bila dilihat persentasenya, persentase pengeluaran untuk makanan lebih besar namun tidak berbeda jauh dengan pengeluaran non makanan yaitu sebesar 56,26 persen untuk pengeluaran makanan dan persentase pengeluaran untuk non makanan sebesar 43,74 persen. Hal ini menunjukkan pengeluaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud masih cenderung pada konsumsi makanan dibandingkan konsumsi non makanan.

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran, 2022

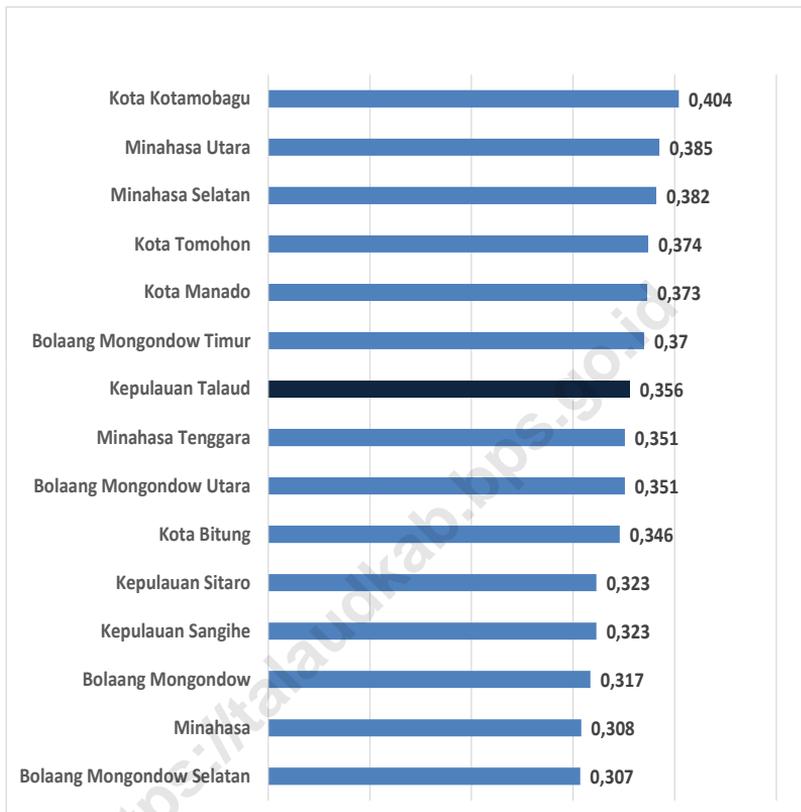
Jenis Pengeluaran	Nominal	Persentase
(1)	(2)	(3)
Makanan	618.253,00	56,26
Non Makanan	480.689,00	43,74
Perumahan	262.101,00	23,85
Barang dan Jasa	87.421,00	7,96
Pakaian dan Alas Kaki	27.088,00	2,46
Barang Tahan Lama	62.421,00	5,68
Pajak dan Asuransi	30.659,00	2,79
Keperluan Pesta	10.999,00	1,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Sulawesi Utara 2022

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan, yaitu mendekati pendapatan dengan pengeluaran. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak pendekatan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah indeks gini atau *gini ratio*.

Indeks gini Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 sebesar 0,356, artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud masih dalam tingkat yang rendah yaitu memiliki indeks gini kurang dari 0,4. Semakin tinggi indeks gini, maka semakin timpang pendapatan antar penduduk. Penduduk kaya makin kaya, penduduk miskin makin miskin.

Gambar 5.1 Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2022



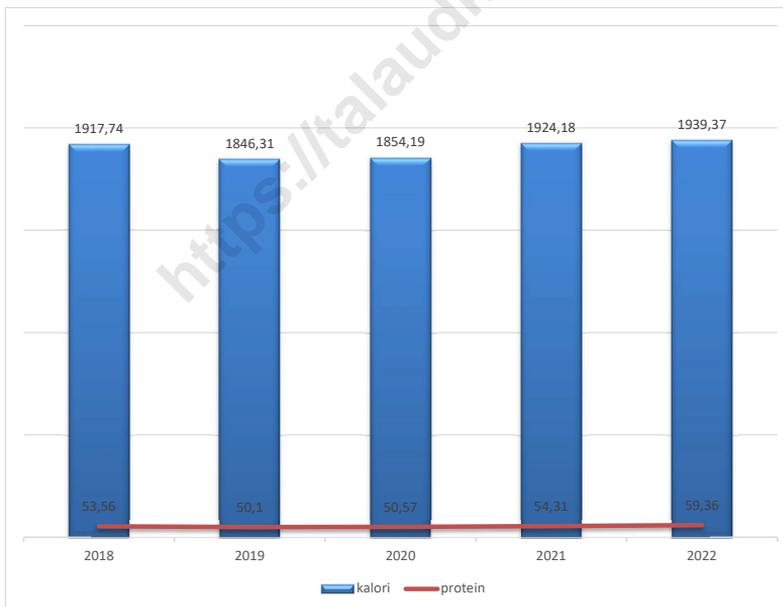
Sumber : Tabel Statis BPS Provinsi Sulawesi Utara

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Kepulauan Talaud menempati peringkat 9 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang memiliki indeks gini terendah. Dengan kata lain, Kabupaten Kepulauan Talaud menduduki peringkat ke 9 dengan ketimpangan pendapatan terendah di Sulawesi Utara. Seperti yang telah disebutkan bahwa angka tersebut masih tergolong pada ketimpangan rendah (Indeks Gini < 0,4) yang berarti pendapatan antar penduduk di Kabupaten Talaud relatif homogen. Indeks gini tertinggi berada di Kota Kotamobagu, yaitu sebesar 0,404.

5.2 Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

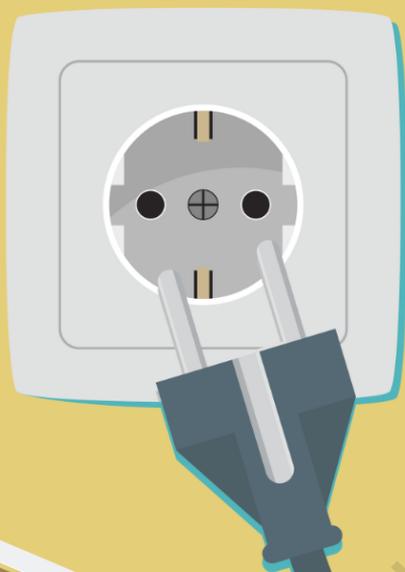
Gambar 5.2 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud, 2018- 2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Talaud 2022

Pada tahun 2022 energi yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud belum memenuhi angka kecukupan energi yang ditetapkan yaitu 2.150 kkal per hari. Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud baru mengonsumsi kalori sekitar 1.939,37 kkal per hari pada tahun 2022. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 sekitar 1.924,18 kkal per hari. Sedangkan untuk konsumsi protein, penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud juga sudah melampaui angka kecukupan protein yang ditetapkan, sebesar 57 gram per hari. Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud mengonsumsi protein sebesar 59,36 gram per hari pada tahun 2022. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sekitar 54,31 gram protein per hari.

<https://talaudkab.bps.go.id>



PERSENTASE RUMAH TANGGA
YANG MENGGUNAKAN LISTRIK
PLN

99,73 %



PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN
AIR MINUM LAYAK PADA TAHUN 2022

86.55 %

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN | 6

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak.

Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumah tangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumah tangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

6.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka, sehingga kondisi kesehatan perumahan juga sangat terkait erat dengan kondisi kesehatan setiap anggota keluarga maupun tetangga sekitar. Bila kondisi perumahan sehat, tentunya peluang setiap anggota rumah tangga untuk memiliki kondisi tubuh yang sehat juga sangat besar. Namun sebaliknya, jika kondisi rumah tidak sehat maka potensi terjadi penularan penyakit juga sangat besar.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Tabel 6.1 memberi gambaran bahwa terlepas dari kepemilikan, sebagian masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud tinggal di rumah yang kualitasnya cukup baik, yaitu beratap layak, berdinding permanen dan berlantai bukan tanah.

Tabel 6.1 Rumah Tangga menurut Indikator Kualitas Perumahan (persen), 2022

Indikator	Persentase (%)
(1)	(2)
Lantai Layak	96,81
Atap Layak *	99,75
Dinding Permanen	97,71
Rata-rata luas lantai per kapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$	95,61

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2022

*) Tidak beratap dedaunan

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Luas lantai per kapita juga digunakan untuk mengukur apakah suatu rumah merupakan perumahan yang layak huni atau tidak. MDGs menetapkan standar luas lantai per kapita menjadi salah satu indikator rumah kumuh. Rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi masuk dalam salah satu kriteria rumah kumuh. Kriteria rumah kumuh tidak hanya dilihat dari luas lantai per kapita, oleh sebab itu tidak dapat serta merta menyatakan rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi masuk dalam kategori menempati rumah kumuh. Dengan mengadopsi standar MDGs tersebut, masih terdapat sekitar 4,39 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2 meter persegi di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022.

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumah tangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi

kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2022, 96,81 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai lantai layak. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai layak akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa 99,75 persen rumah tangga tinggal di rumah yang beratap layak dan 97,71 persen rumah tangga rumahnya berdinding permanen.

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban dengan tangki septik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam bahasan ini, cakupan air bersih yang dimaksud adalah air kemasan, air isi ulang, air ledeng, air pompa, air sumur terlindung, dan air yang bersumber dari mata air yang jaraknya lebih dari 10 meter dari pembuangan akhir tinja. Pada tahun 2022, 69,64 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki sumber air minum bersih. Sementara itu, 86,55 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki akses air minum yang layak.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Di Kabupaten Kepulauan Talaud, menurut data hasil Susenas tahun 2022 terdapat sekitar 86,33 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dimana 96,33 persen dari rumah tangga tersebut dilengkapi dengan tangki septik.

Tabel 6.2 Rumah Tangga menurut Indikator Fasilitas Perumahan (persen), 2022

Indikator	Persentase (%)
(1)	(2)
Akses Air Minum Layak	86,55
Sumber air minum bersih *	69,64
Jamban sendiri	86,33
Jamban sendiri dengan tangki septik	96,33
Sumber penerangan listrik	99,73

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2022

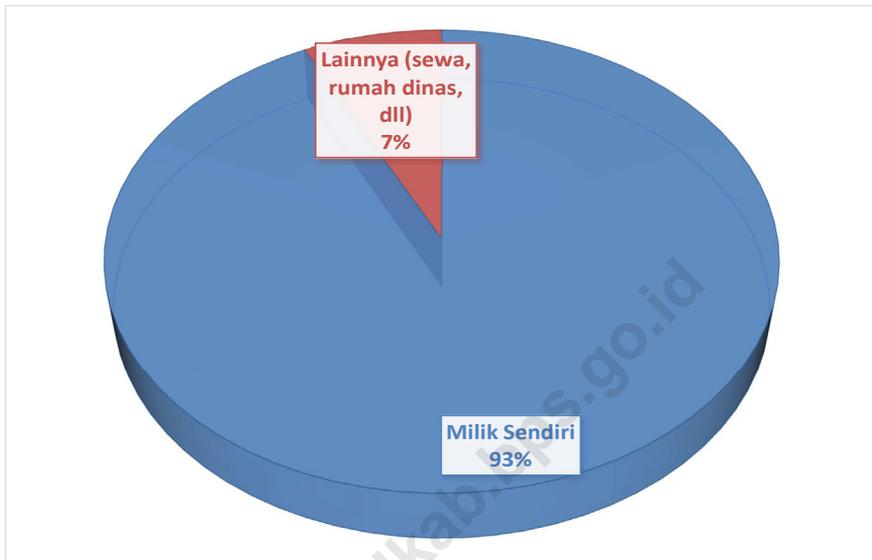
*) Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah > 10m

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan data hasil Susenas 2022, 99,73 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah menikmati fasilitas listrik baik dengan meteran maupun tidak.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara, atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Pada tahun 2022, sebanyak 92,67 persen rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Talaud menempati rumahnya sendiri. Sisanya 7,33 persen menempati rumah sewa, rumah dinas, dan lainnya.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan Talaud Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati, 2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2022



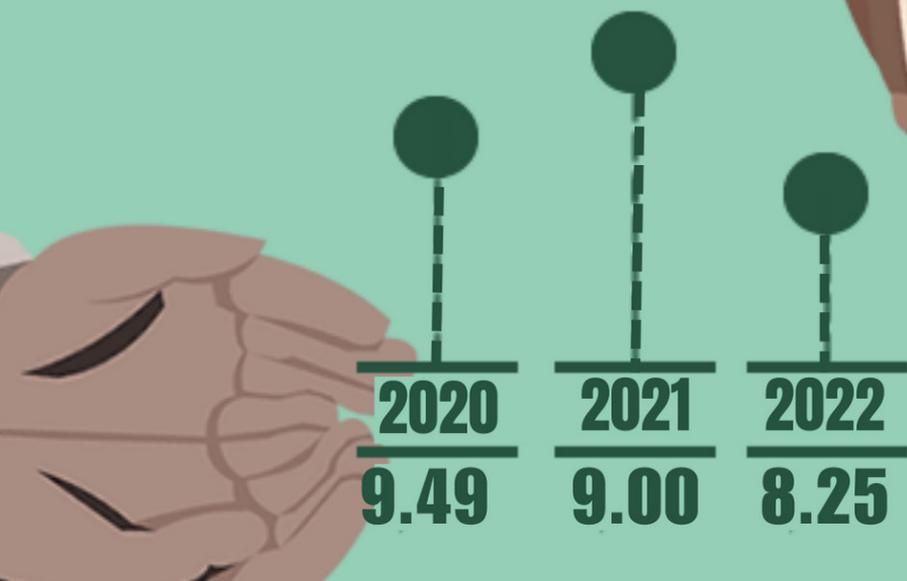
GARIS KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 2022

Rp 319.974,00

<https://talaudkab.go.id>



PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)



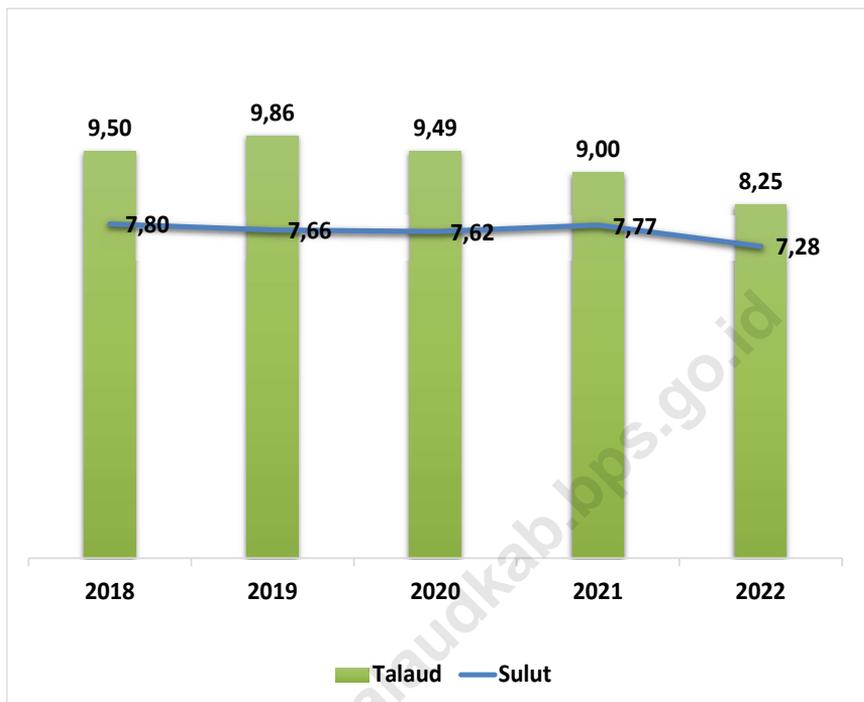
Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (sumber: BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs, yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

7.1 Perkembangan Kemiskinan

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin, 2018- 2022



Sumber : Tabel Statistis BPS Provinsi Sulawesi Utara

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Talaud berada di atas angka Sulawesi Utara. Artinya, Kabupaten Kepulauan Talaud ikut menyumbang terhadap bertambahnya angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud berfluktuatif atau naik-turun setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud menurun 0,75 persen dari tahun 2021, yaitu dari 9,00 persen menjadi 8,25 persen. Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 ini searah dengan perkembangan tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Utara yang menurun pada tahun 2022. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami fluktuasi namun pada empat tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan.

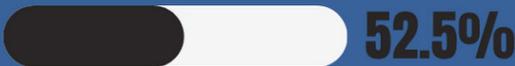
7.2 Garis Kemiskinan

Seorang penduduk masuk dalam kategori miskin atau tidak ialah dengan membandingkan rata-rata pengeluaran per bulannya dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Oleh karena itu, tinggi rendahnya garis kemiskinan sangat menentukan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2022 adalah sebesar 319.974 rupiah per kapita per bulan. Maka, penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah 319.974 rupiah dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, garis kemiskinan tahun 2022 meningkat sebesar 11.579 rupiah atau sebesar 308.395 rupiah pada tahun 2021.

MENGGUNAKAN TELEPON



MENGGUNAKAN INTERNET



Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan tingkat pelayanan wilayah serta program pemerintah seperti bantuan sosial baik tunai maupun non tunai. Semakin besar masyarakat mendapatkan perlindungan sosial semakin berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1 Akses pada Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan HP/telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Telepon Seluler (Hp) Menurut Jenis Kelamin, 2022

Indikator	Menggunakan Telepon Seluler (HP)		Total
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	74,47	25,53	100
Perempuan	74,82	25,18	100
Laki-laki + Perempuan	74,64	25,36	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2022

Dilihat dari tabel 8.1, sebanyak 74-75 dari 100 penduduk 5 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Talaud yang menggunakan telepon seluler (HP). Selain penggunaan HP, akses terhadap internet juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, Susenas Maret 2022 memberi gambaran bahwa 51-52 dari 100 penduduk 5 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Talaud mengakses internet. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 11 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dipelopori dengan mulai menyebarnya sinyal internet salah satu operator di beberapa kecamatan di Kepulauan Talaud akibat pembangunan BTS di beberapa tempat serta mulai menyebarnya salah satu layanan wifi milik Telkom Indonesia di beberapa kecamatan besar.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Berumur 5 Tahun Ke Atas Yang Mengakses Internet Menurut Jenis Kelamin, 2022

Indikator	Mengakses Internet		Total
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	52,55	47,45	100
Perempuan	50,70	49,30	100
Laki-laki + Perempuan	51,65	48,35	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2022

8.2 Program Perlindungan Sosial

Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, pemerintah telah melaksanakan berbagai jenis program perlindungan sosial yaitu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebagainya. Aliran dana dan bantuan ke masyarakat baik berupa bantuan sosial tunai maupun non tunai akan berdampak kepada kesejahteraan keluarga serta membantu dalam pergerakan ekonomi rakyat.

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2022

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang menerima
(1)	(2)
BPNT/Program Sembako	13,41
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	13,74
Program Keluarga Harapan (PKH)	20,06
Jaminan Pensiun	10,22
Asuransi Kecelakaan Kerja	8,90

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2022

Berdasarkan tabel di atas, 13,41 persen masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi target Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan secara riil telah menerima bantuan tersebut. Kemudian jenis program terbanyak yang telah sampai pada masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu 20,06 persen masyarakat telah secara riil menerima bantuan tersebut. Semua program ini diharapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga yang mendapatkan bantuan tersebut.

8.3 Kredit Usaha

Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan Susensas Maret 2022, pada tahun 2022 persentase jumlah rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Talaud yang menerima kredit sebanyak 26,24 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kreditnya, dari rumah tangga penerima kredit tersebut paling banyak menerima kredit jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu sebesar 59,89 persen.

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga menurut Ada atau Tidak ART yang Menerima Kredit, 2022

Jenis Kredit	Persentase (%)
(1)	(2)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	59,89
Kredit Bank Umum	31,89
Kredit BPR	1,65
Kredit Koperasi	4,60
Kredit Perorangan dengan Bunga	2,96
Kredit Pegadaian	0,00
Kredit Perusahaan Leasing	1,75
Kredit BUMDES	0,00
Pinjaman Online	0,63
Kredit Lainnya	0,65

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2022

8.4 Tindak Kejahatan

Selain bantuan kredit usaha, tingkat keamanan wilayah juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Menurut data hasil Susenas tahun 2022, hanya sebanyak 0,12 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi korban kejahatan selama 1 Januari - 31 Desember 2021. Angka ini menurun dari tahun 2021 sebanyak 0,90 persen. Rendahnya angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Talaud dimungkinkan karena telah efektifnya tim-tim khusus dari masing-masing Polsek di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait tindakan kriminal di lingkungan sekitar.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik Kabupaten
Kepulauan Talaud**

Kompleks Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud,
Melonguane, 95885

Email: bps7104@bps.go.id

website : talaudkab.bps.go.id